

KAJIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PELALAWAN

Ahmad Hidir¹, Mar'aini²
Universitas Riau¹, ASM Persada Bunda Pekanbaru²

ABSTRACT

The study of Capacity development of Pelalawan District DPRD Members aimed to find out what factors need to be developed and anticipated for the need of human resource development and the capacity development model of DPRD members and to find the model of policies and programs to improve the human resources and DPRD Institution in accordance with the demand and development of the community in Pelalawan Regency . The result of the study on Capacity development of Pelalawan District DPRD members is generally good enough, but there are still some obstacles both internally and externally analyzed by using SWOT analysis. To minimize such obstacles, some action plans were required to be carried out, such as added Administrative personil in accordance with the needs of the Ministry, Education and Training in accordance with the needs of members of the Board to perform 3 functions of the Board. Expert Staff and technical team were capable of supporting the duties of Device according to their fields and expertise and work visit and comparative study which is more meaningful, transparent and accountable.

Keywords: Capacity development, DPRD

ABSTRAK

Kajian Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor apa yang perlu dikembangkan dan diantisipasi untuk kebutuhan pengembangan SDM dan model pengembangan kapasitas anggota DPRD serta menemukan model kebijakan dan program upaya peningkatan SDM dan Kelembagaan DPRD sesuai dengan tuntutan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Hasil Kajian tentang Pengembangan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ini secara umum sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal yang dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk meminimalisasi kendala tersebut diperlukan rencana tindak yang harus dilakukan antara lain menambah personil Administratif sesuai dengan kebutuhan kedewan, Pendidikan dan Latihan sesuai dengan kebutuhan anggota Dewan untuk menjalankan 3 fungsi Kedewan, Staf Ahli dan tim teknis yang mampu menyokong tugas Kedewan sesuai bidang dan kepakarannya serta Kunker dan Stuban yang lebih bermakna, transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, DPRD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengembangan kapasitas (*Capacity Buiding*) merupakan Salah satu bentuk dari upaya memperluas keterlibatan *stakeholders* yang berkaitan secara Langsung maupun tidak Langsung dengan suatu kebijakan. Pengembangan kapasitas diperlukan khususnya untuk mengembangkan keterampilan, manajemen dan kebijakan yang esensial. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membangun struktur budaya, sosial, politik , ekonomi dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga pengembangan kapasitas diharapkan khususnya Anggota legislatif (DPRD) dapat tanggap terhadap perubahan lingkungannya.

Dalam berbagai draft akademik (*academyc drafting*) pengembangan kapasitas dapat berupa : pengembangan sumber daya manusia (Fiszbein, 1997, Grindle, 1997, Word Bank dalam Edralin, 1997). Pengembangan kapasitas dapat pula berupa penguatan organisasi dan manajemen (Grincie, 1997, Fiszbein, 1997, Eade, 1998, Mentz, 1997, United Nations dalam Edralin,1997).Pengembangan kapasitaspun dapat dibangun melalui

pengembangan sistem jaringan atau network. Pengembangan kapasitas juga dapat dilakukan dengan penyesuaian lingkungan yang kondusif (World Bank dalam Edralin, 1997, Grindle 1997) dan dapat pula dilakukan dalam bentuk penyerahan mandat dan struktur legal, kemampuan fisik, serta aktivitas-aktivitas program (UN dalam Edralin, 1997).

Berbagai bentuk pengembangan kapasitas merupakan satu kesatuan sistem di mana antara satu dengan lainnya bersifat saling mempengaruhi. Hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan masukan (*input*) berupa semua sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan, proses (menerapkan teknik dan metode yang tepat), umpan balik (*feedback*) berupa perbaikan input dan proses serta aspek pengembangan lingkungan (penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif). Pengalaman sejumlah Negara dunia ketiga yang pernah mengalami suatu masa seperti Afrika Selatan, Amerika Latin dan Asia pada umumnya, khususnya Negara-negara industri baru di Asia Timur dan Tenggara seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura tahap-tahap awal pembangunan selalu diwarnai oleh kurang kuatnya peran anggota legislatif (DPRD). Namun setelah ekonomi berkembang dan pendapatan perkapita penduduk meningkat, maka munculah kesadaran rakyat yang ditandai oleh iklim demokrasi politik. Maka secara perlahan peran Lembaga DPRD harus berkembang karena tuntutan masyarakatnya.

Maka dalam konteks kajian ini, arah kajian difokuskan pada upaya pengembangan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan pengembangan struktur anggota legislatif (DPRD) sebagai suatu agenda setting (*setting agenda*) dan Salah satu bentuk antisipasi serta prakondisi terhadap upaya desentralisasi dan otonomi daerah, utamanya di Kabupaten Pelalawan. Dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan politik yang ada, kajian ini diarahkan dalam bentuk kajian partisipatif yang dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan anggota legislatif (DPRD) di Kabupaten Pelalawan.

Dalam berbagai dinamika yang berkembang. Pengembangan kapasitas disadari bukan tanpa kendala. Hambatan-hambatan tersebut antara lain berupa pengaruh Lingkungan internal maupu eksternal, pengembangan sumberdaya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Untuk kasus ini pengembangan kapasitas difokuskan pada upaya-upaya positif yang disesuaikan dengan karakteristik masalah dan potensi anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan sesuai dinamika politik dan kebutuhan kelembagaannya.

B. Tujuan

Sesuai Latar belakang masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan faktor-faktor apa sajakah yang perlu dikembangkan dan diantisipasi untuk kebutuhan pengembangan SDM dan organisasi lembaga DPRD di Kabupaten Pelalawan.
2. Mencari model pengembangan kapasitas yang sesuai dengan karakteristik umum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.
3. Menemukan model kebijakan dan program yang dapat ditawarkan sebagai langkah pemecahan masalah dalam upaya peningkatan SDM dan kelembagaan DPRD sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

METODE KAJIAN

A. Ruang Lingkup Kajian

Ruang Lingkup Kajian Pengembangan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dibatasi dalam lingkup lokasi penelitian yaitu lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Pertimbangan penentuan lokasi ini didasari atas kebutuhan kelembagaan DPRD Kabupaten Pelalawan.

B. Fokus Kajian

1. Untuk menemukan faktor-faktor apa sajakah yang perlu di kembangkan dan di antisipasi untuk kebutuhan pengembangan SDM dan organisasi lembaga DPRD di Kabupaten Pelalawan .
2. Mencari model pengembangan kapasitas yang sesuai dengan karakteristik umum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.
3. Menentukan model kebijakan dan program yang dapat ditawarkan sebagai langkah pemecahan masalah dalam upaya peningkatan SDM dan pekembangan masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

C. Teknik Analisis

Teknik yang digunakan dalam Kajian Pengembangan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif, yakni mendeskripsikan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk narasi.
2. Anlisa SWOT untuk mengetahui Strategi pengembangan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. SWOT adalah kependekan dari *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Kesempatan) dan *Threats* (Ancaman).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggapan Masyarakat Terhadap Lembaga DPRD.

Dari hasil FGD yang dilakukan di berbagai tempat dan dalam setting yang berbeda-beda diketahui bahwa perihal tanggapan dan aspirasi masyarakat terhadap kelembagaan DPRD Kabupaten Pelalawan ini memang sangat subjektif sifatnya dan dari hasil wawancara juga ditemukan sebahagian besar responden menyatakan bahwa DPRD tampaknya tidak akan banyak membawa perubahan pada kehidupan mereka. Penilaian ini memang terlalu dini dan sangat subjektif, tetapi apapun tanggapan dan penilaian masyarakat haruslah ditanggapi dengan kepala dingin dan sebagai masukan berharga pihak untuk kemajuan kelembagaan kedewanan

Sementara itu di pihak lain sejumlah responden menyatakan bahwa eksistensi anggota DPRD menyatakan akan lebih baik dan akan banyak membawa perubahan (34,28 %) pada kehidupan mereka. Optimisme ini, menurut mereka disebabkan karena anggota Legislatif yang dipilih berdasarkan suara terbanyak, maka bila mereka tidak melakukan amanah yang diembannya dengan baik, maka dapat dipastikan mereka pada periode berikutnya tidak akan terpilih kembali. Artinya bila anggota DPRD ini tidak memberikan kinerja yang baik, maka harapan masyarakat yang dibebankan pada mereka akan dicabut “mandat” nya pada periode berikutnya. Untuk itu mereka menganggap bahwa para anggota DPRD ini harus menunjukkan kinerjanya jauh lebih baik. Agar mereka tidak mengalami delegitimasi di mata publik dan konsttuen pemilihnya.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD harus dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alal-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga Negara.

Dari FGD yang dilakukan terungkap bahwa masyarakat menganggap kebijaksanaan publik yang dihasilkan oleh DPRD belum seluruhnya berpihak kepada masyarakat. Sebahagian besar dari responden menyatakan bahwa keberhasilan DPRD terhadap masyarakat baru sebahagian kecil saja dan belum menyentuh kebutuhan dasar mereka.

B. Visi Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Pelalawan

Pelalawan telah menetapkan Visinya dengan slogan "*Mewujudkan DPRD sebagai Lembaga terpercaya dan amanah*". Dalam visi dimaksud terkandung misi DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tugas, peran dan fungsi DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan,
2. Menciptakan kedsama dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakat
3. Mewujudkan profesionalisme DPRD.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi profesionalisme DPRD itu, terkandung tujuan bahwa untuk mencapai hal itu diperlukan pengembangan dan penguatan kualitas dan kapasitas anggota DPRD.

Maka intinya, visi dan pengembangan kapasitas kelembagaan DPRD menjadi penting untuk menciptakan lembaga perwakilan yang otonom, mandiri, efektif, serta memiliki komitmen terhadap rakyat yang

diwakilinya. Masyarakat menuntut untuk mempunyai lembaga perwakilan yang lebih transparan, efektif, profesional dan kredibel. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menjamin kemampuan lembaga legislatif dalam menyediakan kapasitas pendukung yang memadai dan profesional.

Beberapa fasilitas pendukung kerja yang dibutuhkan oleh lembaga DPRD Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan masalah dan kebutuhan :

1. SDM yang profesional dan memiliki spesialisasi dan dedikasi kepada DPRD.
2. Sistem teknologi informasi yang memadai; pusat informasi dengan data-data yang komprehensif dan pelayanan yang proaktif, Hal ini penting mengingat DPRD juga memerlukan fasilitas pendukung kerja dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan memiliki hak untuk ikut Serta dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang dulunya lebih banyak menjadi ranah dan wewenang pemerintah daerah (eksekutif).

Dengan demikian peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD menjadi kebutuhan untuk mendukung tugas – tugas kedewanan. Sumber daya menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa kelembagaan DPRD mampu menyediakan fasilitas pendukung kerja yang memadai bagi para anggota dewan untuk melayani rakyat dengan lebih baik.

C. Analisis SWOT Untuk Pengembangan Kapasitas DPRD

Sesuai hasil kajian pengembangan kapasitas DPRD Kabupaten Pelalawan, analisis SWOT dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memiliki dampak terhadap kinerja kedewanan. Untuk menjelaskan bagaimana pengembangan kapasitas yang mungkin dilakukan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel Matrik Analisis SWOT

	EKTERNAL	PELUANG(O)	ANCAMAN (T)
INTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan demokrasi dan otonomi Daerah 2. UU tentang PEMILU 3. Keputusan DPRD tentang tatib 4. DPRD semakin menguat sebagai wadah aspirasi masyarakat 5. Adanya program E-Government 6. Dukungan PEMDA terhadap anggaran dan sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delegitimasi Publik terhadap Anggota DPRD 2. Kontrol masyarakat dan Ormas semakin kuat terhadap DPRD 3. Belum berperannya fungsi legislasi dan kontrol dari DPRD 4. Potensi konflik Eksekutif dan legislatif 5. Penyalahgunaan IT, sarana dan prasana kedewanan dan disfungsi mamfaat

		6. Fasilitasi Kunker, Stuban yang tidak transparan dan Akuntabel
YANG HARUS DILAKUKAN	STRATEGI (S-O) Kekuatan untuk meraih peluang	STRATEGI (S-T) Kekuatan untuk meminimalisasi ancaman
KEKUATAN (S) 1. Legitimasi dari masyarakat terhadap DPRD semakin kuat 2. Menguatnya lembaga DPRD sebagai Pressure group untuk perubahan dan pembangunan 3. Tatip DPRD 4. Adanya Visi dan Misi DPRD sebagai lembaga terpercaya dan amanah	1. Peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui Pendidikan dan Latihan sesuai dengan karakteristik dan potensi anggota DPRD 2. Perlunya penyediaan tenaga Ahli dan konsultan setiap Komisi /Fraksi sesuai dengan disiplin Ilmu dan keahlian yang dimiliki. 3. Transparansi penggunaan Anggaran dan akuntabilitas anggota yang tersedia	1. Melakukan Kunker dan Stuban sesuai dengan kebutuhan dengan uji Publik, indikator dan hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan didepan masyarakat, 2. Kontrol internal dengan Reward dan punishment tenaga Administrasi disertai remunerasi 3. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas kedewanan.

YANG HARUS DILAKUKAN	STRATEGI (W-O) Kelemahan untuk meraih peluang	STRATEGI (W-T) Kelemahan untuk mengantisipasi ancaman
KELEMAHAN (W) 1. Fungsi legislasi dan kontrol dari DPR belum optimal 2. Anggota DPRD terdiri dari beragam latar belakang Pendidikan yang tidak merata 3. Personil Sekretariat lebih banyak mengerjakan tugas rutin administrasi dan seringnya pergantian	1. Perlunya diadakan pendidikan dan pelatihan secara reguler berdasarkan prioritas tentang : (1) Politik lokal dan Desentralisasi.(2) Hubungan kelembagaan Pemerintahan Daerah.(3) Etika Politik.(4) Teknik penyusunan Regulasi.(5)Teknik Formulasi Anggaran berbasis kinerja. (6)	1. Melakukan kunker, stuban secara kontinyu pada masyarakat /konstituen dengan tepat, menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak terjadi delegitimasi dari Publik. 2. Senantiasa

<p>personil karena adanya perubahan struktur kedinasan dari pihak Eksekutif</p> <p>4. Kurangnya fasilitas perpustakaan (pustakawan) komputer, Labtop dan sejenisnya sebagai pendukung tugas-tugas kedewanan</p> <p>5. Kurangnya tenaga ahli profesional menurut bidang kepakarannya yang dapat membantu tugas-tugas kedewanan sebagai konsultan kebijakan dan pemahaman isu-isu strategis lainnya</p> <p>6. Kurangnya tenaga profesional administratif yang mampu menyeimbangkan tugas-tugas kedewanan</p>	<p>Manajemen dan Artikulasi komunikasi politik massa.(7) Manajemen kebijakan partisipatif dan pengambilan keputusan. (8) Manajemen konflik. (9) Pelatihan Manajemen pengawasan. (10) Pemilihan Kepala Daerah .(11) Teknik penyusunan Ranperda. (12) Pelatihan Penggunaan Internet. (13) Pelatihan Manajemen Organisasi. (14) Posisi dan peran anggota DPRD</p> <p>2. Perlunya pengembangan perpustakaan(bila perlu digital dan online), Penambahan tenaga pustakawan, internet dan pembuatan website DPRD yang abdate</p> <p>3. Perlunya penambahan tenaga ahli dan konsultan dewan pakar untuk bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan dalam menanggapi isu-isu strtegis dan penyiapan naskah akademis</p> <p>4. Perlunya penambahan tenaga profesional Administratif yang memahami <i>E-Government</i> dan paham tentang tugas kedewanan secara umum</p>	<p>melakukan abdated informasi dan dsikusi dengan membentuk tim-tim kecil berdasarkan kepakarannya untuk meminimalisasi dan memahami dinamika asyarakat terutama dalam merancang kebijakan yang pro rakyat.</p> <p>3. Membuat hotline, website dan kontak pengaduan interaktif yang lebih luwes dan mudah diakses semua pihak.</p> <p>4. Membuat media interaktif , berupa jurnal, pusat informasi ataupun liputan kedewanan secara berkala</p>
--	--	---

D. Rencana Tindak Pengembangan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan

Dari berbagai hal dan masukan yang ada serta analisis SWOT yang dilakukan, maka dapat dipetakan rencana tindak yang paling mungkin untuk dilakukan sebagai bentuk penguatan dan pengembangan kapasitas DPRD di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana tugas-tugas kedewanan
2. Penyediaan sarana informasi dan penambahan wawasan integritas , orintasi kerja
3. Penyegaran dan pelatihan terhadap personil administrasi untuk menunjang tugas-tugas kedewanan
4. Pelatihan dan pendidikan untuk menambah wawasan integritas, orientasi kerja anggota DPRD, hal ini penting Karena; (1) posisinya yang sangat strategis dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif, (2) fungsi Iegislasi yang melekat pada diri para anggota

dewan, sehingga membuka harapan paska pelatihan ini, akan muncul kebijakan publik yang demokratis dan partisipatif.

PENUTUP

A. Simpulan.

Dari hasil kajian ini diketahui beberapa hal yang perlu dikembangkan terutama menyangkut penyediaan sarana dan prasarana untuk menyokong tugas-tugas mereka sebagai anggota DPRD, antara lain pengembangan perpustakaan online digital, penambahan tenaga perpustakaan, penyegaran tenaga administrative melalui berbagai diklat reguler dan berkala untuk menyokong tugas-tugas kedewanan.

Untuk mendorong kinerja legislasi DPRD Pelalawan memerlukan stat ahli atau tim pakar yang ditempatkan di setiap komisi atau bidang. Tim pakar akan membantu anggota DPRD merumuskan Sejumlah usulan perda atau keputusan Dewan yang benar-benar konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPRD dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh pemerintah daerah (Sekretariat Daerah atau SEKWAN) anggaran yang mereka miliki harus dapat mendukung DPRD dalam melakukan kegiatan riset independen dan menyediakan informasi secara lengkap dan mendengarkan masyarakat tidak hanya selama kampanye saja tetapi juga dalam praktek sehari-hari mengkaji dan analisis kebutuhan masyarakat melalui praktek kunker dan stuban yang transparan dan akuntabel.

B. Rekomendasi.

Rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil kajian ringkas ini adalah; pengembangan kapasitas untuk lembaga DPRD memang suatu keharusan. Dari hasil analisis SWOT, maka rencana tindak yang harus dilakukan. Antara lain :

1. Penambahan personil administratif yang sesuai dengan kebutuhan tugas kedewanan atau penyegaran dan pelatihan bagi personil yang disiapkan untuk menyokong tugas-tugas kedewanan bukan hanya melakukan tugas rutin semata.
2. Penambahan tenaga pustakawan, perpustakaan, IT, internet dan perangkatnya serta pembuatan weblog dan website Serta hotline pengaduan masyarakat dan disertai pelatihan penggunaannya bagi tenaga administrasi dan anggota dewan dalam teknologi informasi sekarang ini.
3. Perlunya diklat sesuai kebutuhan dan karakteristik anggota dewan dalam menjalankan 3 fungsi kedewanan secara reguler berkala dan berjenjang sehingga ada tolok ukur yang jelas.
4. Perlunya tenaga pendamping (staf ahli/dewan pakar), tim teknis, yang mampu menyokong tugas kedewanan menurut bidang dan kepakarannya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan anggota DPRD.
5. Perlunya kunker, stuban yang lebih bermakna dan transparan, akuntabel dan tim teknis untuk mampu menampung aspirasi masyarakat dan adanya dana untuk pengkajian dan pengembangan internal DPRD untuk penguatan kapasitas mereka.

Secara umum rencana tindak apapun yang dilakukan tidak akan bermakna bila tidak ada kemauan dan sikap positif dari semua pihak untuk memajukan kelemahan DPRD

REFERENSI

- Apeksi dan Adeksi .2001 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Jakarta; Breakthrough Urban initiatives for Local development (BUILD) – INS/ 97/018
- Brown, Lisanne: LaFond Anne; Macintyre, Kate. 2001. Measuring Capacity building. Carolina Population Centre/University of nort Carolina, Chapel Hill.
- Departemen Dalam Negeri. 2004. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis SCBD. Jakarta: Depdagri.

- Dhakiri, Moh. Hanif 2004. Tabel "Prakarsa Reformasi Legislatif di Negara-Negara Demokrasi maju dan berkembang" _ Jakarta: NDI. `IWdak diterbitkan.
- FORMAPPI. 2004. Rilis Berita, DPR 1999-2004: Jauh Dari Harapan Rakyat. Jakarta: FORMAPPI.
- Irsyad Syafar Buan. .jurnal OASE edisi 16 Th.2000
- Kartiwa, H.A. Good Loca/ Govemance 5 Mernbangun Birokrasi *Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (makalah), 2006.
- Nakamura, Siichi, DPRD Dalam Berbenah Din, Makalah disampaikan pada Seminar Demokratisasi, Universitas Brawijaya Malang, FH-UB, Mei 2008
- Soedijarto Pendidikan Nasional untuk Menciptakan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional melalui Sekolah sebagai Pusat Pembudayaan. Depasar: Makalah, Pra Kongres Kebudayaan V. 2003. p.7.
- Solihin, Dadang. 2007. Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel, <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mewujudkan-keuangannegara-yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel> (diakses tanggal 22 Februari 2009)